

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG  
KERTAS PALSU**

**(Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya  
Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)**

**SKRIPSI**

Oleh  
Mochammad Hilmi Alfarisi  
C73214055



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Hilmi Alfarisi

NIM : C73214055

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang  
Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan  
Negeri Tasikmalaya Nomor:  
135/Pid.B/2016/PN.Tsm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018  
Saya yang menyatakan



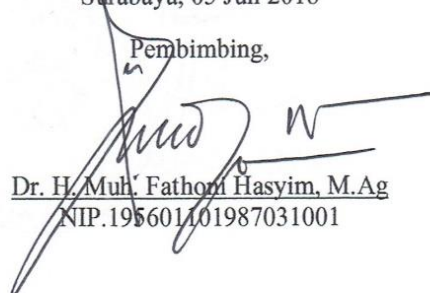
Mochammad Hilmi A.  
C73214055

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi A. NIM C73214055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,



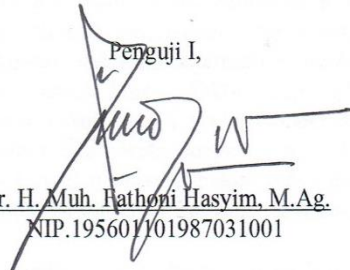
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag  
NIP.195601101987031001

## PENGESAHAN

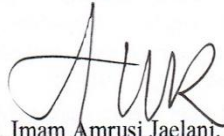
Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi NIM.C73214055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,

  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP.195601101987031001

Penguji II,

  
Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Penguji III,

  
Dr. H. Muhammad Arif, MA.  
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

  
Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I  
NIP.197104172007101004

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Hilmi Alfari  
NIM : C73214055  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : salmanhilmi112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/Pn.Tsm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Mochammad Hilmi Alfari  
C73214055

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan dari hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu analisis yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dalam direktori putusan Pengadilan Negeri nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama kurang tepat. Karena dilihat dari kronologi kasus hingga fakta yang terbukti di persidangan terdapat satu kesesuaian yakni adanya perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam Pasal tersebut terakrit penerapan hukumannya haruslah dipilih yang terberat atau jika melihat dalam direktori putusan ini haruslah memilih dakwaan alternatif yang kedua.

Dalam analisis hukum pidana Islam sendiri, membuat dan mengedarkan uang palsu dikategorikan atau dihukumi dengan *ta'zīr* berupa penjara dan denda. Karena perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak masuk dalam *hūdūd* maupun *qisās*. Dan juga terdapat teori tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana yang oleh para *fuqaha* dibagi menjadi dua macam yakni *Al-Tadākhul* dan *Al-jabb*. Untuk kasus ini dipakai teori saling melengkapi atau *Al-Tadākhul* dikarenakan telah terpenuhinya salah satu syarat atau keadaan dalam teori tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim untuk senantiasa cermat dan jeli dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif saat memeriksa kasus yang ditangani agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
MOTTO .....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II    PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	21
A. Pengertian <i>Jarīmah</i> .....	21
B. <i>Jarīmah Ta’zīr</i> .....	22
C. Dasar Disyariatkannya <i>Jarīmah Ta’zīr</i> .....	25
D. Macam-Macam Sanksi <i>Ta’zīr</i> .....	27
E. <i>Gharar</i> .....	33
F. Perbarengan atau Gabungan Dalam Hukum Pidana Islam.....	34
G. Perbarengan Dalam Hukum Pidana Positif.....	40
BAB III    DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 135/PID.B.2016/PN.Tsm.....	45









Manusia mengenal alat yang dinamakan uang untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kehidupan manusia bisa dibilang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan uang. Meskipun uang hanyalah lembaran kertas dan koin, tapi setiap orang mau bekerja dan sebagian rela melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Hampir semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang adalah contoh betapa besar peranan uang buat manusia. Uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu.<sup>2</sup>

Uang adalah alat tukar/bayar yang diterima secara umum, memiliki satuan-satuan tertentu dengan nilai standar serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang

<sup>2</sup> Amalia Saraswati dkk, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu”. *Jurnal*, tanpa nomor (2016), 4.

digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.<sup>3</sup>

Sedemikian pentingnya uang, menyebabkan sebagian manusia berhasrat untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang lebih mudah, mendorong manusia untuk melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) sendiri, menurut Simons merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>4</sup> Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggaran-pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.<sup>5</sup>

Wujud dari cara-cara tindak pidana itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah pengedaran dan membelanjakan uang palsu, baik berkelompok maupun perorangan, yang dilakukan sekali maupun secara terus menerus atau berkelanjutan.

Indonesia, sebagai Negara yang berlandaskan hukum, mengedarkan dan

<sup>3</sup> Syafarudiin, Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al – Sarf*)", Al – Bayyinah Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan, Volume IV (2011), 2-4.

<sup>4</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 6.

<sup>5</sup> Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

1. Pihak yang menerima uang palsu tidak akan mendapat ganti rugi. Jika yang menerimanya adalah sebuah perusahaan besar, hal tersebut akan memaksa mereka meningkatkan harga komoditas. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan nilai uang riil.
2. Kenaikan harga (inflasi), terpicu karena meningkatnya peredaran uang di pasar. Peredaran uang palsu memaksa pemerintah merilis lebih banyak uang legal.
3. Penurunan penerimaan (*satisfactoriness*) uang. Pelaku pasar akan lebih memilih penggunaan uang elektronik, uang dalam mata uang lain, atau uang dalam bentuk logam mulia sebagai alat pembelian.

memaksa mereka meningkatkan harga komoditas. Dengan demikian akan terjadi pengurangan nilai uang riil.

2. Kenaikan harga (inflasi), terpicu karena meningkatnya jumlah uang di pasar. Peredaran uang palsu memaksa pemerintah untuk mencetak banyak uang legal.
3. Penurunan penerimaan (*satisfactoriness*) uang. Pelaku bisnis memilih penggunaan uang elektronik, uang dalam bentuk logam mulia atau uang dalam bentuk logam mulia sebagai alat pembayaran. Karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan pemerintah, salah satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional.

memaksa mereka meningkatkan harga komoditas. Dengan demikian akan terjadi pengurangan nilai uang riil.

2. Kenaikan harga (inflasi), terpicu karena meningkatnya jumlah uang di pasar. Peredaran uang palsu memaksa pemerintah untuk mencetak banyak uang legal.
3. Penurunan penerimaan (*satisfactoriness*) uang. Pelaku bisnis memilih penggunaan uang elektronik, uang dalam bentuk logam mulia atau uang dalam bentuk logam mulia sebagai alat pembayaran. Karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan pemerintah, salah satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional.

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis sebagaimana yang terdapat di dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm tentang tindak pidana secara berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, yakni Terdakwa I RIDHO FAHRI ALS BUDI membuat uang palsu pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 di rumah kontrakan terdakwa I RIDHO FAHRI di Kp.Kukun Desa Ciantra Kec. Ciantra Kota Cikarang dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp.50.000,- dengan menggunakan alat Printer Foto Copy warna merk EPSON L 350 dengan menggunakan kertas HVS jenis DUSLAH (buram). terdakwa I RIHDO FAHRI menjual uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa II EPI ABDUL QODIR.

[illegible]

Lalu oleh terdakwa II EPI ABDUL QODIR dijual sebanyak 4 (empat) kali kepada sdr AGUS SAPTARI pertama bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1.000.000,- dan sdr AGUS mendapatkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- kedua pada bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1.000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- ketiga pada bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1.000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- dan keempat pada bulan Januari 2016 dijual dengan harga Rp.1.000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana yaitu memalsukan dan mengedarkan uang palsu secara berlanjut. Namun oleh majelis hakim pelaku hanya dijerat dengan pasal 245 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dihukum dengan pidana penjara selama satu (1) Tahun enam (6) Bulan. Serta melihat kasus di atas para terdakwa sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan berlanjut sesuai pasal 64 ayat satu (1) KUHP, dengan menerapkan mekanisme memilih hukuman yang terberat.

Dalam pandangan hukum pidana Islam sendiri, suatu tindak kejahatan disebut dengan *jīnayah*. *Jīnayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *shara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>8</sup> Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah

[illegible]



Terkait perbarengan tindak pidana, dalam hukum pidana Islam pun telah dibahas oleh para *fugaha*, yaitu :

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarīmah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yakni :

- <sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

[illegible]

## 2. Teori Penyerapan (*Al-Jabb*)

### 3. Teori Campuran (*Al-Mukhtalaṭ*)

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.TSm dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang

[illegible]

Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya  
Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm).

## B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat dipaparkan beberapa topik permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Unsur-unsur tindak pidana mengedarkan mata uang kertas palsu.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm.
4. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, dapat diambil batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/PID/B/2016/PN.Tsm menurut hukum pidana Islam?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan perkara Nomor 135/PID/B/2016/PN.Tsm?

Kajian pustaka ini pada intinya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan





dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor  
135/Pid.B/2016/PN.Tsm.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, pastilah memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam penelitian ini, diharapkan mendapatkan sebuah hasil, serta memperoleh daya kegunaan bagi masyarakat luas khususnya bagi segenap civitas akademika di bidang hukum. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu :

## 1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta menambah khazanah keilmuan dalam lingkup hukum pidana Islam. Serta guna mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini.

## 2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk khalayak umum atau masyarakat luas serta sebagai tambahan informasi tentang *jarīmah* atau tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-



undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu.

Supaya dapat memahami dengan jelas dan lugas serta tidak kehilangan arah dan menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini. Maka penulis perlu menjelaskan atau menguraikan tentang definisi operasional dari pengertian judul di atas, yakni sebagai berikut :

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang tentang mata uang, artikel dan direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016 yang dapat ditelaah. Maka untuk mendapatkan hasil yang akurat berikut penjelasan dalam metode penelitian ini :

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm).

Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer, sekunder maupun tersier<sup>16</sup> dalam penelitian ini meliputi :

<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya t.p., 2016), 9.







Bab IV, pada bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dan terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut serta hukum pidana Islam mengedarkan uang kertas palsu (Studi direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.)

skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

# PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

*Jarīmah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”.<sup>1</sup> Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Audah yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hūdūd ta’zīr*.<sup>2</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan *Jarīmah* apabila memenuhi beberapa unsur-unsur berikut ini, yaitu :

- <sup>3</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), 14-17.



2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>4</sup>

### B. *Jarīmah Ta'zīr*

*Ta'zīr* adalah bentuk mashdar dari kata يَعْزُرُ - عَزَرَ yang secara etimologis berarti mencela, menegur atau mencegah.<sup>5</sup> Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut<sup>6</sup> :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (gama-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang. (QS Al-Fath (48): 9)<sup>7</sup>

*Ta'zīr* juga didefinisikan oleh Al-Mawardi ialah menjatuhkan sanksi terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hūdūd*.<sup>8</sup> Sedangkan

<sup>4</sup> Ibid, 28.

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, 925.

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 136.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011). 359.

<sup>8</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *shara'*. *Ta'zīr* sendiri terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarah*. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* perbuatan maksiat. Adapun yang dinamakan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para *fugaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249-250.

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'*.
2. Mencakup semua bentuk / kemaksiatan selain *hūdūd* dan *qisās*.
3. Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *shara'*, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *qadhi* (hakim).
5. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

1. Tindak pidana *hūdūd* dan tindak pidana *qisās* yang *shubhah*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Alquran dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, riba, dan lain-lain.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil ‘amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang

*Jarīmah ta'zīr* berlaku bagi semua orang, setiap orang yang sehat akalunya apabila melakukan kejahatan yang tidak diatur didalam *naş*, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum *ta'zīr* sebagai pendidikan baginya. Berikut hikmah atas diberlakukannya sanksi *ta'zīr*<sup>12</sup> :

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*iṣlah*), *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Setiap hukum tentu memiliki landasan atau dasar hukumnya, sebagaimana dalam *ta'zīr* terdapat hadis Rasulullah saw dan tindakan sahabat yaitu sebagai berikut :

<sup>12</sup> M Nurul Irfan dan Masyrofah, *FIqih...*, 142.



tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwat* (homoseksual atau lesbian).<sup>14</sup>

Diriwayatkan juga bahwa sahabat Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampong tempat penjualan *khamr*, dan membakar istana milik sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.<sup>15</sup>

#### D. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

1. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut uraiannya :

a. Hukuman Mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *zimmi* meskipun telah masuk Islam.

<sup>14</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Flqh...*, 140-142.

<sup>15</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Achmad Zaeni Dahlan, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.





1) Abu hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum *khamr* adalah empat puluh kali.

2) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.

3) Ulama Malikiyah berpendapa bahwa sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *hadd* selama mengandung *maṣlaḥah*. Alasan mereka adalah Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.

Dalam sanksi ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya :

*Al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak

Hukuman penjara juga dibagi menjadi dua, yaitu :

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku *jarīmah* riba, penghinaan, kesaksian palsu. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama.

Hukuman ini tidak dibatasi waktunya, dengan kata lain berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat.

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Namun meskipun itu merupakan hukuman *hadd*, dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Di antara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannās* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar yang

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, berikut beberapa contohnya :

- 1) Penghancuran patung milik orang Islam.
- 2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat.
- 3) Penghancuran peralatan dan kios khamr.
- 4) Penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air.

*b. Mengubahnya (Al-Taghyir)*

#### 4. Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lain

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya.

Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu :

- [illegible]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zīr* sangat beragam mulai yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.<sup>16</sup>

### E. Pengertian *Gharar*

*Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan tentang macam *gharar* yang dilarang salah satunya adalah adanya ketidak jelasan tentang jenis pembayaran, alat pemabayaran, atau benda yang dijual. Dalam proses jual beli jika terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya sebab dalam jual beli tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain.

Di dalam Islam tindak pidana pengedaran uang palsu dapat dikategorikan kedalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang Negara atau uang - uang asing,

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 95-110.

<sup>17</sup>Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”, Al-Iqtisad volume 1, Nomor 1, (Januari 2009), 54.

## Gabungan atau Perbarengan dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Gabungan Anggapan (*concurcus idealis*)

2. Gabungan nyata (*concurcus realis*)

<sup>19</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 95.

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, yaitu :

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarīmah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yaitu :

- Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokan (*hirābah*), keduanya dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zina *muhsan* dan

[illegible]



Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberi pendidikan / pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil tersebut dan mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana untuk kali kedua.

Kalau diperkirakan pelaku akan kembali melakukan perbuatannya, perkiraan ini semata-mata tidak cukup selama belum menjadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Setelah pelaku mengulangi perbuatannya sesudah mendapatkan hukuman, barulah ia dapat dijatuhi hukuman lagi karena hukuman yang pertama ternyata tidak berpengaruh.

- [illegible]

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman meminum minuman keras dan *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina) saling melengkapi. Alasan mereka, tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu sebab orang yang meminum minuman keras biasanya mengigau; siapa yang mengigau maka ia akan membuat kedustaan. Jadi, hukuman meminum minuman keras bertujuan mencegah tindakan kebohongan.

Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa letak saling melengkapinya hukuman meminum minuman keras dan hukuman *qazaf* ialah pada persamaan besarnya hukuman, bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh *fuqaha* mazhab Maliki kelompok pertama.

[illegible]



Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya, apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah, hak manusialah yang didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana, hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.

melengkapi (*tadākhul*). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Sejalan dengan itu, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa kemudian membunuh ketika melakukan perampokan, maka

### 3. Teori Campuran (*Al-Mukhtalaṭ*)

## G. PERBARENGAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

*Samenloop* atau *concursum* merupakan istilah kata dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. *Samenloop* (perbarengan tindak pidana) merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhan / pemberian pidana. Dalam Pasal 18 Ayat 2 (dua) KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

<sup>21</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum...*, 143-146.

<sup>22</sup> Subairi Chasen, “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Nomor 1 (Juni, 2017), 149.







1. jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.
2. Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.
3. Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp. 25,-. Maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.

[illegible]



**DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TASIKMALAYA NOMOR : 135/PID.B/2016/PN.Tsm TENTANG  
TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN  
UANG KERTAS PALSU**

## 1. Sejarah Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimekarkan dengan adanya Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya sekarang ini mempunyai 2 (dua) Wilayah Hukum yaitu :

- [illegible]



Pada awalnya saksi Brigpol Epi Firmansyah bersama dengan saksi Brigpol Dede Heri yang merupakan anggota Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap saksi Maman Suherman (berkas terpisah) yang mengedarkan uang palsu di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu kedua saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri melakukan pengembangan dengan menangkap saksi Soemantri, saksi Agus Saptari, dan saksi Noni Andriani dan mendapat informasi uang palsu tersebut didapat dari terdakwa I Ridho Fahri dan terdakwa II Epi Abdul Qadir, kemudian saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri menangkap para terdakwa.

Abdul Qadir, kemudian saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Dede Heri menangkap para terdakwa.

Atas penangkapan tersebut, dari terdakwa I saksi Br Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri mendapatkan 1 (satu) buram (Duslah) A 4, 3 (tiga) Rim kertas A 4 Merk ZAP, 1 (satu)



penjualan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang asli dan terdakwa I Ridho mendapat laba bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdakwa II Epi Abdul Qodir membeli uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa I Ridho sebanyak 3 kali, yang **pertama** pada bulan Desember 2015 di Bekasi membeli lembaran uang palsu yang belum jadi seharga Rp. 2.000.000,-, terdakwa II mendapat 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp. 50.000,- yang belum jadi. Yang **kedua** membeli gambar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan harga Rp. 3.000.000,- dan terdakwa mendapatkan gambar uang palsu sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Dan yang **ketiga** pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II membeli uang palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan gambar uang palsu yang belum jadi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang selanjutnya oleh terdakwa II dirapihkan di rumah terdakwa II.

Lalu oleh terdakwa II dijual sebanyak 4 (empat) kali kepada sdr Agus Saptari, yang pertama bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-, Saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Yang kedua tetap di bulan dan tahun yang sama, dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Yang ketiga juga di bulan dan tahun yang sama, dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Dan yang terakhir pada bulan Januari tahun



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut :

- [illegible]



- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2016 saksi menjual uang palsu kepada saudara Maman pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saudara Maman Suherman membeli uang palsu sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama** membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang **kedua** Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. Saksi Agus Saptari bin Sudarsono (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- [illegible]

- Lalu saksi Agus juga membeli uang palsu kepada saudara Noni sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama** di bulan Nopember 2015 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Saksi Noni Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- [illegible]

- Bahwa saksi membeli uang palsu tersebut langsung dari terdakwa I Ridho Fahri di kontrakannya;

#### D. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi;

- [illegible]



### E. Barang Bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- no seri EJD854998;
- 1 Dus kertas Duslah A4 (buram);
- 3 Rim kertas A4 merk ZAP;
- 1 rol pita poli warna ungu;
- 25 batang lem rol merk Kenko Dblue Stick;
- 1 mesin laminating merk LPF LAMPACKER model LPF-330 WH;
- 3 kaleng cat semprot warna putih merk PYLOX;
- 3 kaleng cat semprot warna clear merk TRIGO PAINT;
- 1 buah date Stamp Merk Joyko;
- 1 buah bk stemp merk Artline;
- 1 buah kaca pembesar;
- 3 buah gambar air yang mirip digambar diuang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit alat UV merk MORGEN;
- 207 lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- tidak ada nomor seri;
- 1 dus kertas duslah (buram bercampur HVS A4)

- Bahwa benar pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu di rumah kontrakannya dan menjualnya kepada pembeli dengan cara menyuruh sang pembeli datang ke kontrakannya;

- Cara membuatnya dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk EPSON L350, dengan kertas HVS buram bolak-balik;

- Uang palsu tersebut saat dijual kepada terdakwa II dan saksi Noni masih dalam bentuk lembaran, sehingga selanjutnya kedua orang tersebut yang merapihkannya sehingga terlihat seperti uang asli;

- Terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan antara bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang palsu dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan uang palsu tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- uang asli;

- Bahwa benar terdakwa II Epi Abdul Qodir membeli uang palsu kepada terdakwa I Ridho Fahri sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, yang



- Selanjutnya uang palsu yang telah terdakwa II Epi Abdul Qodir beli dari terdakwa I Ridho Fahri dijual lagi kepada saudara Agus Saptari sebanyak 4 (empat) kali, yang **pertama** pada bulan Desember 2015 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **ketiga** di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ke **empat** terjadi di bulan Januari tahun 2016

- Bahwa terdakwa I Ridho Fahri dan terdakwa II Epi Abdul Qodir tahu kalau perbuatan ini dilarang:

## G. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan



Ad. 2 Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan cara menyuruh sang pembeli datang kerumah kontrakannya. Uang palsu tersebut dibuat dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan printer photo copy merk EPSON L350, dengan kertas HVS duslah (buram) bolak balik;

Bahwa terdakwa I Ridho bin Fahri menjual uang palsu tersebut kepada terdakwa II Epy Abdul Qodir sebanyak 3 (tiga) kali, , yang pertama pada bulan Desember 2015 di Bekasi membeli lembaran uang palsu yang belum jadi seharga Rp. 2.000.000,-, terdakwa II mendapat 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp. 50.000,- yang belum jadi. Yang kedua membeli gambar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,-

dengan harga Rp. 3.000.000,- dan terdakwa mendapatkan gambar uang palsu sebanyak 300 (tigas ratus) lembar. Dan yang ketiga pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II membeli uang palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan gambar uang palsu yang belum jadi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang selanjutnya oleh terdakwa II dirapihkan dirumah terdakwa II.

Dan terdakwa II menjual lagi uang palsu tersebut kepada saudara Noni Andriani sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan Desember 2015 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ke empat terjadi di bulan Januari tahun 2016 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan beredar  
uang palsu dipasaran;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

## H. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini :

Memperhatikan, pasal 245 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja*







## BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG  
KERTAS PALSU DALAM DIREKTORI PUTUSAN NOMOR  
135/PID.B/2016/PN.Tsm.**

**A. Analisis Terhadap Pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu.**

Hukum ada memiliki suatu tujuan, yakni menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Agar dapat tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, maka dibentuklah suatu lembaga yang di dalamnya berisi para penegak hukum yang mempunyai tugas mengawal tujuan dari hukum tersebut supaya tercapai.<sup>1</sup>

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 39.

Salah satu produk yang dihasilkan hakim adalah suatu putusan, putusan tidak hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun disisi lain akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Putusan yang bukan hanya menjelma menjadi media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak melainkan sebagai sarana bagi orang untuk mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.<sup>3</sup>

putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik dan yuridis.<sup>3</sup>

Kasus yang penulis bahas ini yakni terkait tentang pengedaran kertas palsu secara berlanjut, dalam direktori putusan Pengadilan

<sup>3</sup> Ibid., 32.

dakwaan alternatif yang pertama dituntut menggunakan KUHP Pasal 245 yang berbunyi<sup>4</sup> :

Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dan yang kedua dituntut dengan Pasal 36 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi<sup>5</sup> :

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam amar putusannya, hakim lebih memilih menggunakan dakwaan alternatif yang pertama kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 (dua) tahun penjara, dengan pertimbangan telah masuknya salah satu unsur yang terdapat dalam KUHP Pasal 245 yaitu :

- Barang siapa;
- Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang



Qodir bin Saprudin dan sdri. Noni sebesar Rp. 10.000,- uang asli untuk 1 (satu) lembar HVS durslah yang ada foto copy uang Rp. 50.000,- 2 (dua) buah dengan jumlah Rp. 100.000,-;”

Selanjutnya “Bahwa benar Terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli uang palsu dari terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi sekitar bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 di Cikarang Bekasi sebanyak 3 (tiga) kali yang **pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2015 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab.Bekasi, terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) lembar gambar uang kertas yang belum jadi, yang **kedua** pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2015 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab. Bekasi, membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) lembar gambar uang kertas yang belum jadi, yang **ketiga** pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2016 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab. Bekasi, terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

Lalu setelah itu, “Bahwa benar selanjutnya uang palsu tersebut oleh terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin dirapikan dirumahnya sendiri setelah rapi uang palsu tersebut terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin jual kepada sdr Agus sebanyak 4 (empat) kali”. Dari beberapa poin dalam fakta hukum di persidangan ini, telah terbukti para terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan uang kertas palsu selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan lamanya. Dalam menjatuhkan hukuman, memang hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang ditanganinya, pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan landasan terhadap pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing menggunakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat pidana pokok yang paling berat.
2. Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang
3. Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang

- [illegible]

4. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
5. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.  
Misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang ringan sampai yang terberat; penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.
6. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Dalam hal perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat.<sup>6</sup>

Jelaslah, dari pemapara diatas, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari kronologi hingga fakta hukum yang ada di persidangan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu. Maka disini kuranglah tepat jika hakim

[illegible]



Memang, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub di atas, karena hakim memiliki kehendak atau kuasa dalam menggali kebenaran substantif atas sebuah kasus yang ia tangani.

Seorang pakar yang bernama Jonkers juga berpendapat bahwa hukuman penjara yang terlalu lama menjadi dasar pemberatan pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan meliputi kedudukan sebagai pegawai negeri, pejabat publik, dan gabungan atau lebih delik.<sup>7</sup> maka sebaiknya para terdakwa dikenakan hukuman yang lebih berat karena jelas-jelas mereka melakukan hal yang sama sekali dua kali melainkan berkali-kali serta tentunya perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat umum secara luas.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarīmah* atau tindak pidana serta *'uqubah* atau hukumannya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Lysa Anggrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 1, (Juni, 2015), 47-49.

Selain itu agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu unsur formal, adanya undang-undang atau *nas*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nas* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī Muqararan bil Qānūnīl Waḍ'iy*, Penerjemah: Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), 100.



#### 4. Teori Saling Melengkapi (*Al-Tadākhul*)

- c. Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.
- d. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang yang makan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman.

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain

## 6. Teori Campuran (*Al-Mukhtalat*)

Dari pemaparan beberapa teori gabungan diatas, jika dipadukan dengan kronologi kasusnya maka jelas dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai gabungan hukuman teori yang dipakai ialah teori saling melengkapi atau *Al-Tadākhul*. Dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat atau keadaan-keadaan yakni satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

[illegible]

**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan pertimbangan hakim, fakta yang ada di persidangan serta analisis perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm dengan melihat kesesuaian mulai dari kronologi kasus hingga fakta hukum yang ada di persidangan menyatakan bahwa terdakwa I Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi dan terdakwa II Epi Abdul Qadir bin Saprudin secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. perbuatan berlanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP penerapan atau mekanisme hukumannya haruslah dipilih yang terberat yakni lebih memilih dakwaan alternatif yang kedua, memakai Pasal 36 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Dalam konteks hukum pidana Islam, terdapat beberapa teori berkaitan dengan perbarengan atau gabungan hukuman. Dan jika disesuaikan dengan kasus ini, maka teori yang paling tepat ialah teori

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahwa demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Terlebih lagi mampu mengejawantahkan hakikat penegakan hukum sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Ahmad Taufik. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Achmad Zaeni Dahlan. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Raghib Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrī al-Jinā'i Muqaranan bil Qānūn al-Waḍ'iy*. Penerjemah: Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilalatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p., 2016.
- Faruk, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka setia, 2013.



- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Depok: Logung Pustaka, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1983.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

## SKRIPSI, ARTIKEL, DAN JURNAL ILMIAH

Syafarudiin. Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*)". *Al – Bayyinah Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan*, Volume IV, 2011.

